

Dinamika Konflik dan Integrasi Antara Etnis Dayak dan Etnis Madura (Studi Kasus di Yogyakarta Malang dan Sampit)

Khoiruddin Bashori, Abd. Madjid, Mahli
Zainuddin Tago

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: maztago@yahoo.com.

ABSTRACT

Indonesia is one of the most pluralistic societies in the world consisting of various social groups, ethnics, tribes, languages and religious diversities. However, the social, political, and cultural diversities among people have frequently been resulting conflicts or tensions. Using conflict and integration approach, therefore, this article observes the dynamics relation between ethnic groups, Madura and Dayak ethnic in particular, in certain plural regions in term of ethnic diversities; those are Yogyakarta, Malang and Sampit. After describing an extensive theoretical description, the writers proposed hypothesis and then analyze them quantitatively. Such hypothesis consist of the different integration quality between both Dayak and Madura ethnic groups; the different integration quality between Muslim and Christians; the different integration quality between majority and minority groups; the positive correlation between educational level of people and the integration quality; and the negative correlation between social-economic status and the integration quality, etc. In short, the empirical data perform that religious variables have a

crucial role in determining the quality of conflict and integration in term of the relation between both Dayak and Madura ethnic.

Kata kunci: Konflik, Integrasi, Etnis, Madura, Dayak.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat plural terbesar di dunia yang terdiri dari group sosial, etnik, suku, bahasa dan keragaman agama. Bagaimanapun juga, keragaman sosial, politik dan budaya di antara masyarakat seringkali menjadi pemicu konflik. Dengan menggunakan pendekatan konflik dan integrasi, maka dari itu, artikel ini meninjau hubungan dinamika antara group etnik, yakni Madura dan Dayak di daerah pluralisme tertentu dalam ranah keragaman etnik, yakni Yogyakarta, Malang dan Sampit. Setelah mendiskripsikan teori dengan luas, penulis mengemukakan hipotesis dan kemudian menganalisisnya secara kuantitatif. Hipotesis tersebut terdiri dari perbedaan kualitas integrasi antara group etnik Dayak dan Madura, perbedaan kualitas integrasi antara Muslim dan Kristen, perbedaan kualitas integrasi antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, korelasi positif antara orang yang berpendidikan tinggi dan kualitas integritas; dan korelasi negatif antara status sosial dan ekonomi dan kualitas integritas dan lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, data empiris menunjukkan bahwa variabel agama memegang peranan penting dalam menentukan kualitas konflik mengenai hubungan antara etnik Dayak dan Madura. *Kata kunci: Konflik, Integrasi, Etnis, Madura, Dayak.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun daerah.

Kemajemukan itu sifatnya multidimensional antara lain ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, dan agama. Dalam istilah resmi dan untuk kepentingan administrasi praktis, Pemerintah Indonesia membagi suku bangsa Indonesia menjadi tiga golongan yaitu: (1) suku bangsa yang memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, (2) golongan keturunan asing yang tidak memiliki wilayah asal dalam wilayah Indonesia karena daerah asal mereka yang terdapat di luar negeri (Cina, Arab atau India) atau karena keturunan campuran (Indo Eropa) dan (3) masyarakat terasing yaitu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penduduk yang masih hidup dalam tahap kebudayaan sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah dalam lingkungan yang terisolasi. Dari sisi agama, walaupun negara Indonesia mempunyai sekitar 90% penduduk yang beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Lima agama dunia yang memuja satu Tuhan secara resmi diakui, walaupun masih banyak religi lainnya (terutama dalam masyarakat terasing, yang diterima dan disebut kepercayaan tradisional.¹

Dalam interaksi antar berbagai kelompok masyarakat, kemajemukan bisa melahirkan integrasi sebagaimana dia juga bisa melahirkan konflik. Pada tahun 1995 Karel C. Steenbrink dengan optimis menulis bahwa Indonesia selama masa 45 tahun terakhir memberikan gambaran kerukunan agama yang hampir-hampir bebas dari berbagai konflik. Itu merupakan prestasi yang sangat hebat- merupakan perkembangan yang dianggap luar biasa di tempat lain.² Pada umumnya berbagai hubungan tampak kuat dan stabil di tingkat lokal. Ketegangan yang sangat banyak selama 45 tahun silam muncul

pada tingkat politik nasional Indonesia, namun dapat pula ditemukan adanya hasrat serupa kepada stabilitas dan ketidaksenangan terhadap perubahan radikal.³ Dalam konteks ini dapat difahami pernyataan Geertz bahwa kesadaran akan kesatuan kebudayaan antara lain dalam bentuk nasionalisme cenderung melindungi masyarakat dari perpecahan.⁴

Tetapi dewasa ini hanya ada sedikit masyarakat multikultural yang tidak memiliki sejarah permusuhan antar etnik yang membentuk mereka.⁵ Bangsa Indonesia, misalnya, pada paruh kedua dekade terakhir abad ke-20, menghadapi berbagai konflik: baik yang bernuansa kesukuan, kedaerahan, keagamaan, maupun antar kelompok lainnya. Kasus Timor-timor (1995), Situbondo (1996), Tasikmalaya (1997) dan beberapa kasus yang terkait dengan SARA di Surabaya, Ambon, Ujung Pandang, Pekalongan, Pasuruan dan didaerah lain telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik materi (masjid, gereja dan tempat peribadatan lain) maupun hubungan sosial antar umat beragama.⁶

Konflik-konflik yang memakan banyak korban harta maupun jiwa itu ada yang bisa ditemukan solusinya dan ada yang sampai sekarang masih berlangsung. Konflik antar komunitas Islam dan Kristen di Situbondo, misalnya, bisa diselesaikan. Kerusakan Situbondo yang berlangsung pada 10 Oktober 1996 ini berakibat tewasnya 5 jiwa dan rusaknya 34 bangunan yang di antaranya berupa terbakarnya 20 gereja. Setelah melakukan penelitian mendalam tentang konflik Situbondo ini, Retnowati menulis sebagai berikut. *Pertama*, kerusakan itu merupakan konflik sosial keagamaan yaitu konflik horizontal meyangkut hubungan antar agama. Penyebabnya adalah akumulasi

segala keresahan dan ketidakpuasan yang dialami masyarakat, jadi bukan merupakan sesuatu yang bersifat spontan.⁷

Masalah pokok sebagai penyebab konflik bukan pada perbedaan aspek doktrin ajaran tetapi pada masalah non teologis, terutama pada kecemburuan keagamaan yaitu karena adanya gaya hidup beragama kelompok Kristen yang demonstratif. *Kedua*, telah terjadi kesenjangan komunikasi sosial antar agama karena tumbuhnya gaya hidup eksklusif dari kelompok sosial tertentu. Ketegangan yang lama terpendam meledak dalam bentuk amukan massa yang didukung oleh faktor non agama. *Ketiga*, kesenjangan ekonomi bukan merupakan faktor utama konflik, penguasaan sumberdaya ekonomi yang tidak simetris antara pelaku ekonomi hanya merupakan faktor pendukung saja. *Keempat*, pola pembinaan lembaga gereja dan pesantren cenderung eksklusif, berorientasi ke dalam yaitu berisi tentang pendidikan agama sendiri, kurang berorientasi ke luar. Dalam hal ini pemeluk agama kurang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama lain. Sikap beragama yang demikian ini sangat rentan konflik karena mudah terjadi kesalahpahaman, stereotype negatif, prasangka dan curiga terhadap agama lain. *Kelima*, Resolusi konflik berhasil dilakukan melalui konsiliasi dan mediasi. Dialog dilakukan antara lembaga gereja, NU dan pesantren dan menghasilkan kesepakatan bersama menyangkut sumber-sumber konflik dan solusinya. *Keenam*, konflik menghasilkan nilai dan tatanan baru, menyadarkan pemeluk agama untuk menjalani kerjasama, perlunya keterbukaan dan saling pengertian.⁸

Kebalikan dari kerusuhan Situbondo adalah konflik Ambon. Konflik Ambon,

salah satu dari konflik di atas, yang telah berlangsung sejak 19 Januari 1999 dan mengakibatkan tewasnya ribuan jiwa serta ratusan ribu penduduk mengungsi (TEMPO, 23 Januari 2000). Walau telah diberlakukan keadaan darurat sipil, sampai saat ini konflik antar umat beragama di Ambon pada khususnya maupun kepulauan Maluku pada umumnya belum juga berakhir. Kerusuhan di Ambon dan sekitarnya adalah tragedi kemanusiaan sekaligus tragedi bangsa yang memilukan. Sebelumnya tidak terbayangkan bisa terjadi bentrokan massal antara dua kelompok pemeluk agama berbeda di Indonesia sampai berdarah-darah.⁹

Setelah konflik antar etnis Madura dengan Dayak dan Melayu mereda di Sambas Kalimantan Barat dan sekitarnya, pada 12 Februari 2001 kembali meledak konflik yang sama dengan skala yang lebih hebat di Sampit, Kalimantan Tengah. Kerusuhan itu telah mengakibatkan 469 orang tewas dan puluhan ribu warga mengungsi (ADIL, 19 Maret 2001, hal. 17). Dengan demikian, kerusuhan Sampit antara etnis Dayak dan Madura ini lebih parah dari kerusuhan Sambas yang 'hanya' menewaskan 50 orang itu (REPUBLIKA, 23 Februari, 2001).

Penelitian tentang interaksi antar komunitas, baik berbentuk konflik maupun integrasi, telah banyak dilakukan. M. Atho Mudzhar, misalnya, setelah meneliti interaksi antar Kelompok Islam dengan Kelompok Towani Tolotang dan Tolotang Benteng (kelompok aliran kepercayaan di Amparita, Sulawesi Selatan) menemukan bahwa aspek-aspek yang mendorong integrasi sosial di Amparita adalah: adanya kepercayaan yang sama tentang Gunung Lowa, adanya pemilikan bersama atas kekayaan kebudayaan lama, adanya pendidikan dan kegiatan-

kegiatan kepemudaan yang melibatkan semua kelompok, adanya ritus dan jaringan sewa menyewa yang melibatkan semua kelompok dalam aktivitas pertanian, adanya interaksi dalam Golkar dan lembaga pemerintahan desa, adanya pemukiman yang membaaur dan sumber air minum yang sama, dan adanya faktor kekerabatan.¹⁰

Secara teoritis, masyarakat bisa terintegrasi bila: *pertama*, individu yang menjadi anggota masyarakat mengalami rasa memiliki sebagai suatu kelompok sosial atau kolektivitas berdasarkan antara lain atas norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yang disepakati bersama. *Kedua*, aktivitas maupun fungsi dari istitusi atau subsistem di dalam suatu masyarakat lebih saling melengkapi daripada saling berlawanan satu dengan lainnya. *Ketiga*, adanya lembaga tertentu yang menganjurkan untuk saling mengisi/mengimbangi dan mengkoordinir aktivitas dari berbagai subsistem dari masyarakat itu sendiri.¹¹

Dalam hal konflik antar etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Tengah yang menelan ratusan korban jiwa, memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan hancurnya banyak harta benda itu, terdapat berbagai perspektif yang mencoba menjelaskannya. Bagi orang Madura, sebagaimana tercermin dalam sinyalemen Basra (Badan Silaturrahi Ulama Madura), konflik antar etnis di Sampit mengarah pada sentimen agama. Tetapi bagi orang Dayak, pada khususnya dan warga Kalteng non-Madura pada umumnya, konflik itu murni konflik antar etnis (Kalteng Pos, 26 Februari 2001).

Pendapat kalangan Dayak yang lebih komprehensif terlihat dalam laporan tentang Konflik Etnik Sampit, Kronologi, Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis,

Saran, yang dibuat oleh Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT). Dalam point ke tiga laporan itu disebutkan fakta-fakta menunjukkan bahwa adanya suatu rencana penguasaan/kolonisasi secara paksa/kekerasan, sehingga status konflik tidak hanya antar etnik, tetapi juga bersifat aksi “penguasaan suatu wilayah “ secara berencana. Konflik itu juga dilihat dalam kerangka usaha pihak tertentu untuk mengobok-obok dan meningkatkan desintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (LMMDD-KT, 2001).

Senada dengan itu, M. Saily Mochtar melihat konflik yang terjadi di Kalteng itu bukan sebagai konflik agama, bukan konflik karena kecemburuan ekonomi, bukan pula konflik antara Dayak dan Madura. Konflik ini adalah konflik antara masyarakat Kalteng dengan sekelompok masyarakat etnis Madura yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan norma perilaku masyarakat umum yang hidup berdampingan dan tidak profesionalnya penegakan hukum. Watak yang temperamental dan kebiasaan membawa senjata tajam mungkinjuga menjadi salah satu penyebabnya (Kalteng Pos, 22 Maret 2001).

Dari berbagai perspektif lainnya yang bisa dilacak oleh peneliti belum terlihat adanya penelitian yang mencoba melihat konflik antar etnis itu dari perspektif variabel-variabel yang kuantitatif empiris. Padahal penelitian itu menjadi penting untuk menghindari subyektivitas yang dipengaruhi oleh stereotipe dari berbagai pihak yang terlibat.

KONFLIK, INTEGRASI DAN ETNISITAS

Konflik dan integrasi

Dengan membaca berbagai literatur

sosiologi terlihat bahwa tidak ada satu kesepakatan definitif tentang pengertian integrasi. Jadi terdapat beberapa pengertian tentang integrasi. Sebagai perbandingan, berikut ini diambil empat definisi yang diperoleh dari beberapa sumber

Dalam *Collins Dictionary of Sociology*, misalnya, konsep integrasi dipakai dalam tiga makna: *pertama*, integrasi berarti suatu tingkat dimana seorang individu merasa memiliki suatu kelompok sosial atau kolektivitas dengan menerima norma, nilai, kepercayaan kelompok sosial itu. *Kedua*, integrasi berarti suatu tingkat dimana aktivitas atau fungsi tertentu dari lembaga atau subsistem yang berbeda dalam suatu masyarakat berada dalam keadaan saling melengkapi, tidak saling kontradiktif. *Ketiga*, integrasi adalah hadirnya suatu lembaga khusus yang mendorong dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan masing-masing subsistem masyarakat.¹²

Charles H. Banton, dalam kaitannya dengan hubungan antar ras, mendefinisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam suatu masyarakat tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut.¹³ Sunyoto Usman melihat integrasi sosial sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan-kedekatan hubungan sosial, ekonomi dan politik.¹⁴

Walau terdapat beberapa titik tekan dari berbagai pengertian yang dibuat oleh para ahli tersebut, nampak bahwa dalam suatu konsep integrasi sosial setidaknya-tidaknya tercakup hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, bahwa integrasi merupakan suatu tingkatan dalam hubungan antar kelompok dalam

masyarakat. *Kedua*, dalam hubungan itu hadir suatu kesadaran kolektif yang antara lain berbentuk rasa memiliki kelompok, saling menjaga keseimbangan dan kebersamaan.

Dengan mengacu pada definisi David Jary dan Julia Jary tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat bisa terintegrasi bila: *pertama*, individu yang menjadi anggota masyarakat mengalami rasa memiliki sebagai suatu kelompok sosial atau kolektivitas berdasarkan antara lain atas norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yang disepakati bersama. *Kedua*, aktivitas maupun fungsi dari institusi atau subsistem di dalam suatu masyarakat lebih saling melengkapi daripada saling berlawanan satu dengan lainnya. *Ketiga*, adanya lembaga tertentu yang menganjurkan untuk saling mengisi/mengimbangi dan mengkoordinir aktivitas dari berbagai subsistem dari masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi adanya suatu integrasi sosial itu adalah adanya: kesadaran kolektif, aktivitas yang saling melengkapi, lembaga tertentu yang berfungsi koordinatif, *cross cutting affiliations*, dan saling ketergantungan ekonomi.

Durkheim membagi integrasi sosial atas dua hal: pertama, integrasi normatif, yang ada dalam perspektif budaya dan menekankan solidaritas mekanik yang terbentuk melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Kedua, integrasi fungsional yang menekankan pada solidaritas organik, suatu solidaritas yang terbentuk melalui relasi saling tergantung antara bagian atau unsur dalam masyarakat.¹⁵

Integrasi melalui tahapan-tahapan:¹⁶ akomodasi, kerjasama, koordinasi dan

asimilasi. Mengutip Ogburn dan Nimkoff, Astrid mendefinisikan akomodasi sebagai pribadi atau kelompok bekerja bersama dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan atau permusuhan-permusuhan. Jadi walaupun ada perbedaan dan permusuhan, itu dilupakan dalam rangka kerja bersama. Ini terjadi karena adanya kepentingan yang sama, adanya tujuan obyektif yang sama. Fase ini juga ditandai dengan tercapainya kompromi dan toleransi.

Fase berikutnya adalah fase kerjasama. Ini terjadi bila pekerjaan kelompok (kerja bersama) berlangsung cukup lama. Pada fase ini juga mulai muncul solidaritas ketika reaksi terhadap suatu kejadian adalah sama bahkan terjadi pembagian kerja. Bila kebiasaan bekerjasama lambat laun mencapai situasi dimana orang/kelompok mengharapkan dan mempunyai kesediaan untuk bekerjasama, maka ini berarti tercapai fase koordinasi.

Fase terakhir dari integrasi adalah asimilasi yaitu proses dimana individu/kelompok yang tidak sama menjadi sama dan itu terlihat dari kepentingan dan pandangan-pandangan mereka. Tiap pihak telah menyesuaikan diri sehingga tercapai situasi adanya pengalaman dan tradisi bersama.¹⁷

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setidaknya ada 10 elemen yang harus ada dalam situasi sosial yang disebut integrasi. Ke sepuluh elemen itu bisa dilihat sebagai tahap-tahap atau dilihat sebagai unsur-unsur yang saling melengkapi. Dalam hal ini peneliti tidak melihat kesepuluh hal itu sebagai sebuah proses tetapi lebih sebagai unsur atau indikasi suatu integrasi karena masing-masing indikator itu kadang saling tumpang tindih dan yang satu tidak harus menjadi prasyarat bagi hadirnya elemen yang lain. Ke sepuluh indikator itu

adalah: 1) tidak memasalahkan adanya perbedaan-perbedaan, 2) munculnya usaha-usaha adaptasi, 3) hadirnya kompromi dan toleransi, 4) adanya kerja bersama, 5) adanya reaksi yang sama terhadap suatu kejadian, 6) munculnya pembagian kerja, 7) berkembangnya solidaritas, 8) adanya kerjasama yang telah berlangsung lama, 9) adanya harapan-harapan dan kesediaan untuk bekerjasama, 10) mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama atau adanya pengalaman-pengalaman bersama yang baru.

Antara ras dan kelompok etnis

Ras maupun etnik merupakan kenyataan sosial yang penting karena orang menilai penting akan keberadaan kelompok yang dianggap sebagai rasnya. Tetapi ras adalah konsep yang membingungkan karena tidak ada kesepakatan umum mengenai istilah tersebut.¹⁸ Oleh karena itu dapat difahami ketika Weber melihat etnisitas sebagai suatu identitas, kesadaran, afiliasi dan komitmen pada suatu aksi yang sangat beragam, sesuai dengan pengalaman historis dari kategori etnis yang spesifik dan batas-batas politik dimana hal itu terjadi.¹⁹ Dalam kaitan ini Koentjaraningrat mengusulkan istilah kelompok etnik diganti dengan istilah golongan etnik atau suku bangsa.

Para ahli sosiologi lalu menggunakan istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok -baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras yang secara sosial dianggap telah berada dan mengembangkan sub-kulturnya sendiri. Walaupun perbedaan kelompok dikaitkan dengan nenek moyang tertentu, namun ciri-ciri pengenalnya dapat berupa bahasa, agama, wilayah kediaman, kebangsaan, bentuk fisik, atau gabungan dari beberapa ciri tersebut.²⁰

Identitas etnis memiliki aspek obyektif dan subyektif. Aspek obyektif adalah bahasa, agama, ras, kedaerahan dan budaya. Aspek subyektif adalah bahwa kelima hal itu ditafsirkan secara subyektif oleh masing-masing pihak. *Bahasa*: tidak semua pemakai bahasa yang sama merasa satu etnis (misal: antara Bosnia muslim, Kroatia dan Serbia; antara suku Hutu dan Tutsi). *Agama*: tidak semua mereka yang satu agama merasa satu etnis (misal: antara muslim India, Pakistan dan Banglades; antara muslim Kurdi dengan muslim Iraq, Iran, Suriah dan Turki). *Kedaerahan*: tanpa berasal dari satu kawasanpun orang bisa merasa satu etnis (misal: Yahudi sebelum Israel-1948; orang-orang Gipsi di Eropa Tengah dan Timur). *Ras*: warna kulit sering merupakan konstruk sosial, tidak biologis (kulit berwarna di Afrika Selatan sama dengan kulit hitam di Amerika Serikat). *Budaya*: walau sama berbahasa Inggris, budaya kelas atas dan budaya kelas bawah sangat berbeda di Inggris, khususnya dalam hal cara makan, musik, sport, percakapan, pakaian.

Perbedaan etnis tidak selalu berarti konflik terbuka. Banyak etnis di suatu tempat yang tidak merasa terancam secara sosial politik, mereka bisa bekerja sama sesuai aturan. Tetapi di tempat lain perbedaan etnis bisa berarti susah di atur, mengarah kekerasan, menciptakan instabilitas yang luas dan bahkan menghancurkan kehidupan. Dalam hal konflik etnis, meski banyak yang muncul secara spontan, banyak juga yang butuh rekayasa politik, penggerak, jaringan organisasi, diskursus (perangkat prinsip-prinsip dan ide-ide) untuk mengaktifkannya.²¹

Di Indonesia etnisitas biasanya dihubungkan dengan suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara dan berkaitan

dengan pembagian hukum adat.²² Pada sebagian negara yang mejemuk etnisitas menunjukkan gejala separatisme yang berakar pada perasaan primordial suku bangsa sehingga kurang menyumbang pada nasionalisme kebangsaan. Hal ini nampak dalam kurang efektifnya interaksi antar suku bangsa. Interaksi antar suku bangsa menjadi sulit karena perbedaan budaya dijadikan indikasi untuk membedakan efektivitas interaksi di dalam suku bangsa (*in group*) dengan kelompok luar (*out group*) yang ditandai dengan menguatnya solidaritas *in group* dan melemahnya solidaritas *out group*.²³ Kesetiaan pada etnis juga tumbuh di daerah/kota lain di luar daerah asal. Ini disebut *urbanism ethnic*. Di daerah perantauan, orang yang berasal dari daerah atau etnis yang sama memperlihatkan kecenderungan masih mempunyai kesetiaan kepada etnis atau daerah asalnya.²⁴

Menurut Donald I. Noel stratifikasi etnik muncul bila terpenuhi tiga persyaratan: etnosentrisme, persaingan dan perbedaan kekuasaan. Etnosentrisme menurut Sumner adalah suatu sudut pandang yang menempatkan kelompok sendiri di atas segala-galanya dan menilai kelompok lain dengan memakai kelompok sendiri sebagai acuan. Stratifikasi etnik tidak terjadi bila hanya salah satu atau dua prasyarat yang terpenuhi. Etnosentrisme saja, misalnya, tidak menyebabkan stratifikasi etnik bila antara kedua kelompok yang berinteraksi terjalin kerjasama dan saling ketergantungan. Etnosentrisme dan persaingan tanpa disertai perbedaan kekuasaan, menurut Noel, hanya akan melahirkan persaingan berkepanjangan tanpa penyelesaian. Kontak antara kelompok kulit hitam dengan kelompok kulit putih berkembang menjadi hubungan perbudakan

dimungkinkan karena adanya etnosentrisme di pihak kelompok kulit putih, adanya persaingan di bidang ekonomi, dan adanya kekuasaan lebih besar di pihak kelompok kulit putih.²⁵

Hubungan antar kelompok

Kelompok (*group*) adalah kumpulan orang yang menyepakati suatu masalah dan bergerak bersama dalam menyikapi masalah tersebut, memiliki harapan bersama dan memiliki suatu rasa senasib sepenanggungan. Ada banyak macam kelompok: persahabatan informal, kelompok-kelompok etnis, masyarakat, kelompok antar masyarakat. Hubungan antar kelompok adalah bentuk-bentuk hubungan yang dikembangkan di antara dua kelompok.²⁶

Berdasar sejarah hubungan antar kelompok para ilmuwan sosial telah mengidentifikasi berbagai kemungkinan pola hubungan. Banton menulis bahwa kontak antara dua kelompok ras dapat diikuti proses akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi dan pluralisme. Pola hubungan seperti itu juga bisa berlaku dalam hubungan antar kelompok lain di luar kelompok ras. Akulturasi terjadi manakala kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Sering terjadi antara kebudayaan dua masyarakat yang posisinya relatif sama, walau juga bisa terjadi antar kebudayaan yang posisinya tidak sama. Dalam sejumlah kasus akulturasi terjadi pula proses dekulturasi seperti terjadi pada kasus hilangnya kebudayaan asli dan hancurnya kehidupan keluarga orang-orang Afrika yang secara paksa diculik untuk dijadikan budak di Amerika Utara, dan dibunuhnya unsur pimpinan orang Aztec di Mexico.

Sementara itu Stanley Lieberman

membedakan dua pola utama dominasi yaitu dominasi kelompok pendatang atas kelompok pribumi (*migrant superordination*) dan pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang (*indigenous superordination*). Pengendalian politik dan ekonomi oleh migran menghasilkan perubahan besar pada institusi politik dan ekonomi serta demografi penduduk setempat dan suatu waktu cenderung memancing reaksi keras dari mereka. Dominasi pribumi di bidang ekonomi dan politik kurang memancing konflik di pihak migran yang didominasi.

Perspektif lain yang dominan dalam hubungan antar kelompok berasal dari pemikiran-pemikiran Marxian yang dikenal dengan teori konflik. Dalam pandangan ini hubungan-hubungan yang saling bersaing beserta konsekwensinya muncul dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang secara konstan selalu berubah. Masyarakat membedakan anggota-anggotanya, memberikan kekuasaan, martabat, uang, lebih besar pada satu kelompok dibanding kelompok lain. Akibatnya muncul ketidakadilan sosial yang menjadi bagian esensial dari suatu sistem stratifikasi. Lebih lanjut, kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (seperti kelas-kelas, kelompok etnis-ras) bersaing untuk menguasai sumberdaya tersedia yang terbatas.

Bentuk hubungan antar kelompok yang lain adalah akomodasi. Akomodasi yang dimaksudkan berkaitan dengan keputusan dua atau lebih kelompok untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang signifikan yang ada di antara mereka dalam rangka kepentingan bersama. Hal ini mengarah kepada pluralisme budaya dimana

berbagai bentuk budaya yang berbeda hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama. Amerika Serikat, misalnya adalah masyarakat yang plural dimana berbagai agama, etnis dan kelompok ras yang berbeda diizinkan hidup secara berdampingan.²⁷

Salah satu bentuk hubungan yang banyak disoroti dalam kajian terhadap hubungan antar kelompok ialah hubungan mayoritas-minoritas. Dalam konteks ini yang coba dijelaskan adalah konsep mayoritas karena bila di suatu tempat terdapat kelompok mayoritas maka tentu secara otomatis kelompok lain disebut minoritas. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian mayoritas. Kinloch mendefinisikan mayoritas sebagai *any power group that defines itself as normal and superior and others as abnormal and inferior on the basis of certain perceived characteristics, and exploits or discriminates against them in consequence*. Dari definisi ini dijumpai beberapa unsur sebagai berikut: mayoritas merupakan kelompok kekuasaan, kelompok tersebut menganggap diri mereka normal dan superior sedangkan kelompok lain (minoritas) tidak normal dan rendah karena mempunyai beberapa ciri tertentu, atas dasar anggapan tersebut kelompok lain mengalami eksploitasi dan diskriminasi.

Edward M. Bruner melihat mayoritas dalam kaitannya dengan kebudayaan. Dalam penelitiannya di Medan dan Bandung Bruner melihat bahwa ada tidaknya suatu kebudayaan mayoritas dominan menentukan bentuk hubungan antar kelompok di suatu wilayah. Medan merupakan suatu kota yang terdiri dari sejumlah minoritas tanpa adanya suatu kebudayaan dominan sehingga antar kelompok-kelompok etnis yang ada berkembang persaingan ketat dan hubungan

antar etnis tegang. Sementara di kota Bandung kebudayaan yang dominan ialah kebudayaan Sunda selaku kelompok mayoritas sehingga di sana para pendatang harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan tersebut dan hubungan antar etnis yang ada bersifat lebih terbuka dan santai.²⁸

HIPOTESIS PENELITIAN

1. Terdapat perbedaan kualitas integrasi antara etnis yang berbeda. Kualitas integrasi etnis Madura lebih besar dibanding dengan kualitas integrasi etnis Dayak.
2. Terdapat perbedaan kualitas integrasi antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Kualitas integrasi pemeluk agama Islam lebih besar dari kualitas integrasi pemeluk agama Kristen.
3. Terdapat perbedaan kualitas integrasi antara kelompok mayoritas, seimbang dan minoritas.
4. Ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kualitas integrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kualitas integrasi.
5. Terdapat hubungan negatif antara status sosial ekonomi dengan kualitas integrasi. Semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin rendah pula kualitas integrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris tentang dinamika konflik dan integrasi dalam interaksi antara komunitas etnis Madura dan etnis Dayak guna menguji hipotesis-hipotesis penelitian.

Variabel penelitian

Sebagai penelitian survai, penelitian ini tidak sekedar deskriptif tetapi lebih jauh juga berusaha melakukan eksplanasi. Karena

TABEL 2
KISI-KISI KUALITAS INTEGRASI DAN NOMOR ITEM

NO	KISI-KISI	WAWASAN		SIKAP		PERILAKU	
		Fav	Unfav	Fav	Unfav	Fav	Unfav
01	Tidak masalahkan perbedaan	--	01,03, 09	--	05,06, 08	--	02,04, 07
02	usaha adaptasi	10,11, 12	--	13,14	15	16,17	18
03	kompromi dan toleransi	19,21, 23	--	20,26	25	22	24, 27
04	kerjasama	28,29, 30	--	--	31,32, 33	34,35, 36	--
05	kesamaan reaksi	37,38, 39	--	--	40,41, 42	43,44, 45	--
06	pembagian kerja	46,47, 48	--	49	50,51	53	52,54
07	solidaritas	56,57	55	58	59,60	61,62	63
08	kerjasama lama	64,65	66	--	67,68, 69	70,72	71
09	harapan/kesediaan bekerjasama	74,75	73	76	77,78	79,81	80
110	pengalaman bersama baru	82,84	83	86	85,87	88, 89, 90	--
Jumlah		23 Item	7 Item	8 Item	22 Item	19 Item	11 Item
Total		90 Item					

tujuannya eksplanatif maka survai ini disamping menggambarkan karakter tertentu dari populasi juga melakukan uji hubungan antar variabel.²⁹ Oleh karena itu terlebih dahulu ditetapkan variabel penelitian sebagai berikut.

1. Variabel bebas: kelompok etnik, kepemelukn agama, kelompok mayoritas/seimbang/minoritas, tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi.
2. Variabel tergantung: kualitas integrasi

Subyek penelitian

Unit analisis dari penelitian ini adalah Sampit, Malang dan Yogyakarta. Karena keterbatasan waktu dan luasnya lokasi penelitian maka terlebih dahulu dilakukan *sampling*. Dari ketiga lokasi itu ditetapkan sampel sejumlah 180 orang, dengan masing-masing lokasi sejumlah 60 orang. Dari 60 responden untuk masing-masing lokasi itu lalu dibagi lagi ke dalam dua kelompok

berdasarkan etnik, yaitu 30 orang untuk etnik Dayak dan 30 orang untuk etnik Madura.

Metode pengumpulan data dan alat ukur yang dipergunakan

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, sesuai dengan jenis data.

1. Angket dipakai untuk mengumpulkan data tentang etnisitas, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi.
2. Penelusuran data sekunder dipergunakan dalam rangka mengidentifikasi data tentang distribusi kependudukan lokasi penelitian
3. Skala dimanfaatkan untuk mengumpulkan data tentang kualitas konflik dan integrasi yang telah terjalin antar dua komunitas tersebut.

Pada tahap pertama data dikumpulkan melalui angket dan skala. Pada skala ini,

pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam sebuah daftar diberi lajur-lajur jawaban yang tingkat-tingkat kebenarannya ditetapkan oleh skala (alternatif) yang menyertai pertanyaan itu.³⁰

Sebagaimana disebutkan di atas, skala digunakan untuk mengetahui kualitas konflik dan integrasi. Skala yang dipakai adalah skala Likert yang penyusunannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.³¹

Pertama, pembuatan *blue print* yaitu cetak biru yang diabstraksikan dari konstruk teoritis yang dipilih. Mengacu pada defenisi Ogburn dan Nimkoff³² bahwa integrasi melalui beberapa tahap yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi dan asimilasi. Masing-masing fase itu juga memiliki beberapa indikasi. dan dengan menggabungkan indikasi-indikasi itu maka dapatlah penulis ambil sepuluh indikasi dari suatu pola hubungan sosial yang disebut integrasi itu.

Kesepuluh indikasi integrasi itu yang kemudian menjadi kisi-kisi dalam penyusunan skala integrasi adalah: (1) tidak memasalahkan adanya perbedaan-perbedaan, (2) munculnya usaha-usaha adaptasi, (3) hadirnya kompromi dan toleransi, (4) adanya kerja bersama, (5) adanya reaksi yang sama terhadap suatu kejadian, (6) munculnya pembagian kerja, (7) berkembangnya solidaritas, (8) adanya kerjasama yang telah berlangsung lama, (9) adanya harapan-harapan dan kesediaan untuk bekerjasama, dan (10) mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama atau adanya pengalaman-pengalaman bersama yang baru.

Kedua, berdasarkan cetak biru tersebut dikembangkan pernyataan-pernyataan (items) yang relevan untuk setiap indikasi itu. Setiap indikasi penulis rumuskan sembilan (9) item yang masing-masing terdiri dari tiga (3) item

tentang aspek wawasan, tiga (3) item tentang aspek sikap dan (3) item tentang aspek perilaku. Sehingga pada tahap ini keseluruhan pernyataan berjumlah 90 item.

Ketiga, kesembilan puluh butir itu sebagian merupakan item yang *favourable* (bila dijawab setuju maka nilainya maksimal dan bila dijawab tidak setuju maka nilainya minimal) dan sebagian merupakan item *unfavourable* (bila dijawab setuju maka nilainya minimal dan bila dijawab tidak setuju maka nilainya maksimal). Item-item *favourable* adalah item no. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90. Dan selain nomor-nomor itu berarti item *unfavourable*. Dengan urutan kerja seperti itu maka diperoleh sembilan puluh item skala kualitas integrasi. Kesembilan puluh item itulah yang diminta diisikan oleh responden dengan cara memilih salah satu dari tiga alternatif jawaban yaitu: S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju.

Metode analisis data

Untuk menguji hipotesis, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan teknik analisis

- 1) Uji-t untuk hipotesis 1 dan 2
- 2) Analisis Variansi 1-Jalur untuk hipotesis 3.
- 3) Korelasi Product Moment untuk menguji hipotesis 4 dan 5.

Semua tes ini dibantu program komputer SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa subyek penelitian ini sebanyak 180

orang yang terdiri dari masing-masing 30 orang untuk etnik Dayak dan 30 orang etnik Madura untuk tiga lokasi yang berbeda. Dari 180 angket itu hanya 150 angket yang kembali dengan rincian sebagai berikut; dari Sampit kembali 60 angket, dari Yogyakarta 60 angket, dan dari Malang hanya kembali 30 angket. Dan dari 150 angket itu ada 14 angket yang tidak terisi secara lengkap, dengan demikian hanya 136 angket yang akan dijadikan sebagai bahan analisis pada bab IV ini.

a. Norma penilaian kualitas integrasi

Norma penilaian diperlukan untuk mengelompokkan proporsi subyek yang memiliki kualitas integrasi rendah, sedang dan tinggi. Norma penilaian yang digunakan adalah norma kelompok. Karena data mengikuti distribusi normal maka subyek akan masuk kategori rendah jika skor kualitas integrasi yang dimiliki $<x-1SD$. Jika skor subyek berada di antara $x-1SD$ dan $x+1SD$ maka digolongkan dalam kategori sedang. Apabila skor subjek $>x+1SD$, maka digolongkan dalam kategori tinggi.³³

b. Kualitas integrasi subjek penelitian

Dari data yang terekam menunjukkan bahwa secara umum kualitas integrasi etnis Dayak dan etnis Madura di lokasi penelitian adalah sedang (64%). Sedangkan kualitas integrasi tinggi (17,6%) tidak berbeda jauh dengan kualitas integrasi rendah (18,4%).

Kenyataan ini berarti bahwa ada 64 % dari subyek penelitian ini yang tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka. Mereka berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap orang yang tidak seagamaawa. Ini juga berarti mereka memiliki banyak pengalaman bekerjasama,

memiliki solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas yang tidak berbeda dengan mereka.

c. Kualitas integrasi Etnis Dayak dan Etnis Madura

Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa dalam hubungan antar suku, etnis Madura memiliki kualitas integrasi rendah paling kecil (10,8%) dibandingkan etnis Dayak (18 %) dan etnis Madura memiliki kualitas integrasi tinggi paling besar (27,7%) dibandingkan dengan etnis Dayak (8,5%).

Keadaan ini berarti bahwa 27,7% etnis Madura di wilayah penelitian betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan etnis Dayak. Mereka selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap orang Dayak. Ini juga berarti mereka memiliki banyak pengalaman bekerjasama, memiliki solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas orang Dayak.

d. Kualitas integrasi dan kepemelukan agama

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa di antara dua komunitas agama yang diteliti ternyata pemeluk Kristen memiliki prosentase kualitas integrasi rendah paling tinggi (33,3%) bila dibandingkan dengan pemeluk Islam (15,7%). Keadaan ini berarti bahwa 33,3% umat Kristen di lokasi penelitian masih agak memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan orang Islam, kurang berusaha beradaptasi, kurang berkompromi dan kurang memiliki toleransi terhadap

pemeluk Islam. 33,3% pemeluk Kristen kurang ada kerjasama, kurang solider dan kurang memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta kurang memiliki pengalaman bersama yang baru dengan pemeluk Islam.

Sebaliknya komunitas Islam memiliki kualitas integrasi tinggi lebih besar (23%) bila dibandingkan dengan komunitas Kristen (4,8%). Keadaan ini berarti bahwa 23% pemeluk Islam di lokasi penelitian betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan orang Kristen, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap pemeluk Kristen. Ini juga berarti 23% pemeluk Islam memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan pemeluk Kristen.

Namun demikian, sebagian besar pemeluk agama (Islam 64,3% dan Kristen 61,9%) memiliki kualitas integrasi sedang. Ini artinya adalah bahwa sebagian besar pemeluk agama di wilayah penelitian tidak memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka yang berbeda agama, berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap pemeluk agama lain. Ini juga berarti bahwa sebagian besar pemeluk agama ada kerjasama, solider dan memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas agama di luar agama mereka.

e. Kualitas integrasi dan mayoritas-seimbang-minoritas

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa prosentase kualitas integrasi rendah terbesar

terjadi pada situasi mayoritas (26,9%).

Sedangkan prosentase kualitas integrasi tinggi terjadi pada situasi minoritas. Keadaan ini berarti bahwa 26,9% kelompok etnis dalam situasi mereka sebagai mayoritas masih agak memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnis lain, kurang berusaha beradaptasi, kurang berkompromi dan kurang memiliki toleransi terhadap kelompok etnis lain itu. Sejumlah 26,9% dari kelompok etnis sebagai mayoritas kurang ada kerjasama, kurang solider dan kurang memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta kurang memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik lain.

Sementara itu prosentase kualitas integrasi tinggi terjadi pada situasi suatu kelompok etnik berposisi sebagai minoritas di suatu kelompok (28,9%). Data ini membuktikan bahwa pada situasi sebagai minoritas, kelompok etnik tertentu betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnik di luar kelompok etnik mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti 28,9% kelompok etnik itu memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik di luar mereka.

Karena prosentase terbesar ada pada kategori kualitas integrasi sedang (63,5 % untuk situasi mayoritas, 67,4 % untuk situasi seimbang dan 60,5 % untuk situasi minoritas) maka ini berarti bahwa antar kelompok etnik Dayak dan etnik Madura pada umumnya tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka. Mereka berusaha beradaptasi, berkompromi dan

memiliki toleransi terhadap orang yang tidak seagamaawa. Ini juga berarti mereka memiliki banyak pengalaman bekerjasama, memiliki solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas umat yang tidak seagama dengan mereka.

f. Kualitas integrasi Etnis Dayak-Madura dan mayoritas-seimbang-minoritas

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, pada situasi sebagai mayoritas, etnis Dayak memiliki kualitas integrasi rendah (29,0 %) lebih tinggi di banding yang dimiliki etnis Madura (23,8 %). Pada situasi yang sama etnis Dayak juga memiliki kualitas integrasi tinggi paling kecil (6,5 %) dibanding yang dimiliki etnis Madura (14,3 %).

Kenyataan ini berarti bahwa lebih banyak kelompok etnis Dayak (29,0%) dibanding kelompok etnis Madura (23,8 %), dalam situasi mereka sebagai mayoritas, yang masih memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnis lain, kurang berusaha beradaptasi, kurang berkompromi dan kurang memiliki toleransi terhadap kelompok etnis lain itu. Mereka juga sebagai mayoritas kurang ada kerjasama, kurang solid dan kurang memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta kurang memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnis lain.

Atau dengan kata lain, dalam situasi sebagai mayoritas, lebih banyak anggota kelompok etnis Madura (14,3 %) dibanding anggota kelompok etnis Dayak (6,5 %) yang betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara

mereka dengan kelompok etnis di luar kelompok etnis mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti lebih banyak anggota kelompok etnis Madura dibanding anggota kelompok etnis Dayak yang memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnis di luar mereka.

Kedua, pada situasi sebagai minoritas, etnis Madura juga memperlihatkan prosentase kualitas integrasi rendah paling kecil (4,2 %) di banding etnis Dayak (21,4 %). Pada situasi yang sama etnis Dayak juga memiliki kualitas integrasi tinggi paling kecil (7,1 %) dibanding yang dimiliki etnis Madura (41,7 %).

Kenyataan ini berarti bahwa pada situasi sebagai minoritas, kelompok etnis Madura memiliki prosentase kualitas integrasi rendah lebih kecil dan memiliki prosentase kualitas integrasi tinggi paling besar dibanding kelompok etnis Dayak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam situasi sebagai minoritas, jumlah anggota kelompok etnis Madura (41,7 %) lebih besar dibanding anggota kelompok etnis Dayak (7,1 %) yang betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnis di luar kelompok etnis mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti lebih banyak anggota kelompok etnis Madura dibanding anggota kelompok etnis Dayak yang memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnis di luar mereka.

g. Kualitas integrasi dan tingkat pendidikan

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan bahwa prosentase kualitas integrasi rendah terbesar terjadi pada tingkat pendidikan tinggi (24%), Keadaan ini berarti bahwa 24% subyek penelitian yang berada pada tingkat pendidikan tinggi masih agak memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnis lain, kurang berusaha beradaptasi, kurang berkompromi dan kurang memiliki toleransi terhadap kelompok etnis lain itu. Sejumlah 24% dari subyek penelitian yang adalah mereka yang berpendidikan tinggi juga kurang ada kerjasama, kurang solid dan kurang memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta kurang memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik lain.

Sedangkan prosentase kualitas integrasi tinggi terbesar terjadi pada situasi tingkat pendidikan menengah (27,8%). Data ini membuktikan bahwa subyek penelitian yang tingkat pendidikannya menengahlah yang betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnik di luar kelompok etnik mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti 27,8% dari subyek penelitian itu memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik di luar mereka.

Karena prosentase terbesar ada pada kategori kualitas integrasi sedang (80 % untuk yang berpendidikan dasar, 61,1 % untuk yang berpendidikan menengah dan 60 % untuk yang berpendidikan tinggi) maka ini

berarti bahwa secara umum subyek penelitian tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka. Mereka berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap orang yang tidak seagamaawa. Ini juga berarti mereka memiliki banyak pengalaman bekerjasama, memiliki solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas di luar etnis mereka.

h. Kualitas integrasi dan status sosial ekonomi

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan bahwa prosentase kualitas integrasi rendah terbesar terjadi pada tingkat ekonomi kuat (23,8%). Keadaan ini berarti bahwa 23,8% subyek penelitian yang berada pada tingkat ekonomi kuat masih agak memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnis lain, kurang berusaha beradaptasi, kurang berkompromi dan kurang memiliki toleransi terhadap kelompok etnis lain itu. Sejumlah 23,8% dari subyek penelitian yang adalah mereka yang berstatus ekonomi kuat juga kurang ada kerjasama, kurang solid dan kurang memiliki harapan dan kesediaan untuk bekerjasama serta kurang memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik lain.

Sedangkan prosentase kualitas integrasi tinggi terbesar terjadi pada situasi tingkat ekonomi menengah (19,8%). Data ini membuktikan bahwa subyek penelitian yang tingkat ekonominya menengahlah yang betul-betul tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnik di luar kelompok etnik mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki

toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti 19,8% dari subyek penelitian itu memiliki banyak pengalaman bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik di luar mereka.

Karena prosentase terbesar ada pada kategori kualitas integrasi sedang (72,4% untuk yang berekonomi lemah, 61,6 % untuk yang berekonomi menengah dan 61,9% untuk yang berada pada tingkat ekonomi kuat) maka ini berarti bahwa secara umum subyek penelitian tidak lagi memasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka. Mereka berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap orang yang tidak seagama. Ini juga berarti mereka memiliki banyak pengalaman bekerjasama, memiliki solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan komunitas di luar etnis mereka.

Hasil pengujian hipotesis

1) Hipotesis pertama penelitian ini berbunyi terdapat perbedaan kualitas integrasi antara etnis yang berbeda. Kualitas integrasi etnis Madura lebih besar dibanding dengan kualitas integrasi etnis Dayak. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan metode statistik t-tes dibantu program SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto (1995), yang rangkuman hasilnya bisa dibaca pada tabel-tabel terlampir.

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas integrasi antara etnis Dayak dan etnis Madura.

Etnis Madura memiliki kualitas integrasi lebih tinggi (rerata=229,877) daripada etnis Dayak (rerata=216,155). Dan dari uji hipotesa juga terlihat bahwa perbedaan itu berada pada taraf signifikansi sangat signifikan ($p=0,000$). Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini terbukti.

2) Hipotesis kedua penelitian ini berbunyi terdapat perbedaan kualitas integrasi antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Kualitas Integrasi pemeluk agama Islam lebih besar dari kualitas integrasi pemeluk agama Kristen. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan metode statistik t-tes dibantu program SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto (1995), yang rangkuman hasilnya bisa dibaca pada tabel-tabel terlampir.

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas integrasi antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Pemeluk agama Islam memiliki kualitas integrasi lebih tinggi (rerata=224,586) dibanding dengan pemeluk agama Kristen (rerata=211,850). Dan dari uji hipotesa juga terlihat bahwa perbedaan itu berada pada taraf signifikansi sangat signifikan ($p=0,006$). Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini terbukti.

3) Hipotesis ketiga penelitian ini berbunyi terdapat perbedaan kualitas integrasi antara kelompok mayoritas, seimbang dan minoritas.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan metode statistik Anava A dibantu program SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto (1995), yang rangkuman hasilnya bisa dibaca pada

tabel-tabel terlampir.

Data yang terrekam dari angket penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas integrasi yang cukup signifikan ($F= 4,465$ dan $p=0,013$) antara kelompok mayoritas, seimbang dan minoritas. Masing-masing kelompok memiliki mean berbeda: kelompok mayoritas (216, 8269), seimbang (224, 0625) dan minoritas (228,3158).

Tetapi bila masing-masing kelompok dibandingkan satu sama lain maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kelompok mayoritas memiliki perbedaan mean (-11,4889)) bila dibandingkan dengan kelompok minoritas. Perbedaan itu signifikan ($p= 0,010$). Kedua, bila kelompok seimbang dibandingkan dengan kelompok mayoritas maka perbedaan mean (7,2383) tidak signifikan ($p=0,131$). Demikian juga halnya bila kelompok seimbang dibandingkan dengan kelompok minoritas maka perbedaan mean (-4,2506) juga tidak signifikan ($p=0,548$).

- 4) Hipotesis keempat penelitian ini berbunyi ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kualitas integrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kualitas intgerasi.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan metode statistik Korelasi Produk Momen dengan dibantu program SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto yang hasilnya bisa dibaca pada tabel-tabel dalam lampiran penelitian ini.

Dari hasil analisa data terbukti bahwa tidak terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan dengan kualitas integrasi ($r= -0,148$ dan $p =-0,086$). Dengan demikian hipotesa keempat

penelitian ini tidak terbukti.

- 5) Hipotesis kelima penelitian ini berbunyi terdapat hubungan negatif antara status sosial ekonomi dengan kualitas integrasi. Semakin tinggi status sosial ekonomi semakin rendah kualitas integrasi.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan metode statistik Korelasi Produk Momen dengan dibantu program SPS Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto (1995) yang hasilnya bisa dibaca pada tabel-tabel dalam lampiran penelitian ini.

Dari hasil analisa data nampak bahwa tidak terdapat hubungan negatif yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan kualitas integrasi ($r=0,012$ dan $p =-0,888$). Dengan demikian hipotesa kelima penelitian ini juga tidak terbukti.

KESIMPULAN

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif, maka pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan berangkat dari data-data kuantitatif sebagaimana terlihat pada deskripsi data dan uji hipotesis tersebut di atas. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan pada dua tahap: *pertama*, pembahasan terhadap hipotesis penelitian yang tidak terbukti yang meliputi hipotesis keempat (tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kualitas integrasi) dan hipotesis kelima (tidak ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan kualitas integrasi). *Kedua*, eksplorasi terhadap data dan hipotesis penelitian yang mendapatkan verifikasi empiris di lapangan.

1. Hubungan tingkat pendidikan dengan kualitas integrasi

Dugaan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan diikuti oleh

semakin tingginya kualitas integrasi yang bersangkutan ternyata tidak mendapatkan verifikasi empiris di lapangan. Berdasarkan deskripsi data nampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata justru semakin besar proporsi subyek yang memiliki kualitas integrasi rendah (pendidikan dasar 12%, pendidikan menengah 11,1% dan pendidikan tinggi 24%).

Observasi di lapangan memberikan informasi bahwa umumnya pelaku konflik berpendidikan rendah. Kenyataan ini bertolak belakang dengan data kuantitatif yang diperoleh. Memperhatikan tingginya proporsi subyek yang memiliki kualitas integrasi rendah adalah mereka yang berpendidikan tinggi, maka peneliti menduga bahwa kelompok kecil dengan kualitas integrasi rendah inilah yang sangat potensial memprovokasi kelompok lain yang lebih besar yang berpendidikan rendah meskipun sebenarnya mereka ini memiliki kualitas integrasi memadai.

2. Hubungan status sosial ekonomi dengan kualitas integrasi

Meskipun dalam pengujian hipotesis tidak nampak hubungan yang signifikan, tetapi deskripsi data menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi subyek semakin banyak proporsi mereka yang memiliki kualitas integrasi rendah (ekonomi lemah 13,8%, ekonomi menengah 18,6% dan ekonomi kuat 23,8%). Kenyataan ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa konflik sosial berupa perebutan kekuasaan terjadi pada faksi-faksi yang berbeda di kalangan kelas tinggi. Hal ini antara lain karena mereka lebih mobil dibanding dengan kelas sosial rendah.

Dalam konflik etnis, menurut Bangura,

meski banyak yang muncul secara spontan, banyak juga yang butuh rekayasa politik, penggerak, jaringan organisasi, diskursus untuk mengaktifkannya. Dan itu semua memang pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berstatus sosial tidak rendah.

3. Kualitas integrasi dilihat dari etnisitas, mayoritas-seimbang-minoritas, dan agama.

Kenyataan yang menarik untuk disimak dalam deskripsi data adalah bahwa kualitas integrasi etnis Madura lebih baik dibanding etnis Dayak. Secara umum, pada kategori kualitas integrasi rendah proporsi etnis Madura lebih tinggi (25,4%) dibanding etnis Dayak (10,8%). Sebagaimana juga pada kategori kualitas integrasi tinggi. proporsi etnis Madura (27,7%) lebih besar dibanding etnis Dayak 8,5%).

Bila variabel mayoritas-seimbang-minoritas dimasukkan dalam kualitas integrasi antar etnis itu, maka terlihat bahwa etnis Madura juga memiliki kualitas integrasi lebih tinggi daripada etnis Dayak. Pada kategori mayoritas, misalnya, etnis Madura memiliki proporsi kualitas integrasi tinggi (14,3%) lebih besar dari proporsi etnis Dayak (6,5). Bahkan pada kategori minoritas, proporsi etnis Madura yang memiliki kualitas integrasi tinggi (41,7%) jauh lebih besar dari proporsi yang dimiliki etnis Dayak (7,1%).

Dengan demikian berbagai sinyalemen yang mengatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab konflik adalah karena arogansi etnis tertentu, dalam hal ini etnis Madura, atau dengan kata lain pendapat yang mengatakan bahwa etnis Madura memiliki kualitas integrasi yang rendah, tidak menemukan verifikasi empiris dalam penelitian ini.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa etnis Madura memiliki rerata kualitas integrasi lebih tinggi dibanding etnis Dayak? Jawaban terhadap pertanyaan ini nampak jelas dengan melihat data yang terdeskripsikan dalam variabel kepemeluk agama. Pada kategori kualitas integrasi rendah, pemeluk agama Islam terbukti memiliki proporsi lebih kecil (15,7%) dibanding pemeluk Kristen (33,3%). Sebagaimana juga halnya pada kategori kualitas integrasi tinggi, proporsi pemeluk Islam (20%), jauh lebih besar dibanding proporsi pemeluk Kristen (4,8%).

Dengan demikian data empiris penelitian ini membuktikan bahwa variabel agama memegang peranan penting dalam menentukan tingkat integrasi dan konflik dari hubungan antar etnis Dayak dengan etnis Madura.

CATATAN AKHIR

1. Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: UI-Press, 1993) hlm. 12-9.
2. Karel Steenbrink, *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 217
3. Karel Steenbrink, *Kawan Dalam Pertikaian...*, hlm. 211.
4. Roland Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) hlm. 220.
5. Anthony Giddens, *Human Societies A Reader*, (Cambridge: Polity Press, 1992) hlm. 162.
6. Anshari Thayib, dkk. (ed.), *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997), hlm. 207-208.
7. Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial (Rekonsiliasi Islam dan Kristen Pasca Kerusakan Situbondo)*, tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Sosiologi, Program Pasca Sarjana UGM, 2000.
8. Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial ...*, hlm. 102-104
9. S. Sinansari Ecip, *Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusakan Lintas Wilayah di Indonesia*, (Bandung: Mizan 1999) hlm.5
10. M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 203-226.
11. David Jary & Julia, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins, 1991) hlm. 315.
12. David Jary & Julia, *Collins Dictionary of Sociology...*, hlm. 315.
13. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993) hlm. 141.
14. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 181.
15. David L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, (New York: The MacMillan Company and The Free Press, 1972) hlm. 382.
16. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Binacipta, 1979).
17. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 123-126; Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989) hlm. 98-99.
18. Paul B. Horton & Hunt, Chester L., *Sosiologi*, (Jakarta: Airlangga, 1992) hlm. 60.
19. Parameswara Krishnan, *Critical Sociology: Essays in Honour of Arthur K. Davis*, (Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1995) hlm. 34.
20. Paul B. Horton & Hunt, Chester L., *Sosiologi...*, hlm. 60-61.
21. Yusuf Bangura, *The Search for Identity: Ethnicity, Religion and Political Violence*, Makalah ke-6 World Summit for Social Development, Kopenhagen, 1995.
22. Masri Singarimbun, "Hak Ulayat Masyarakat Daerah." Makalah disampaikan pada Seminar Kebudayaan Dayak, Pontianak, 1992. hlm. 56.
23. Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Naturalism. Anthropological Perspective*, (Colorado: Pluto Press London Boulder, 1993) hlm.12.
24. Hendro Suroyo Sudagung, "Pembinaan bangsa dan Karakter Bangsa Melalui Hubungan Antar Suku Bangsa" dalam *Proyeksi*, Universitas Tanjung Pura, 1987, hlm. 79; Ichlasul Amal & Armaidly, Armawi (ed.), *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1996) hlm. 140.
25. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 139.
26. Edgar F. Borgotta, *Encyclopedia of Sociology...*, hlm. 962.
27. Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998) hlm. 359.
28. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 135-136.
29. Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999) hlm. 23.
30. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 185.
31. Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial...*, hlm 143
32. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 124
33. Sutrisno Hadi & Pamardiyanto, Seno, *Seri Program Statistik*, (Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 1997).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*,

- Bandung: Mizan, 1992.
- Amal, Ichlasul & Armawati, Armawi (ed.), *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsep Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1996.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas" Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Bangura, Yusuf, *The Search for Identity: Ethnicity, Religion and Political Violence*, makalah ke-6 World Summit for Social Development, Copenhagen, 1995.
- Borgotta, Edgar F., *Encyclopedia of Sociology*.
- Ecip, S. Sinansari, *Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan Lintas Wilayah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Ethnicity and Naturalism. Anthropological Perspective*, Colorado: Pluto Press London Boulder, 1993.
- Faisal, Sanapiyah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Giddens, Anthony, *Human Societies A Reader*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Hadi, Sutrisno & Pamardiyanto, Seno, *Seri Program Statistik*, Yogyakarta: Universitas Gadjahmadda, 1997.
- Horton, Paul B & Hunt, Chester L., *Sosiologi*, Jakarta: Airlangga, 1992.
- Jary, David & Julia, *Collins Dictionary of Sociology*, Galsgow: HarperCollins, 1991.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Krishnan, Parameswara, *Critical Sociology: Essays in Honour of Arthur K. Davis*, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1995.
- Mitchell, G. Duncan, *A Dictionary of Sociology*, London & Henley: Routledge & Keegan Paul, 1968.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mujiana, *Potensi Konflik Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Majemuk*, tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana UGM, 1999.
- Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- O'Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial (Rekonsiliasi Islam dan Kristen Pasca Kerusuhan Situbondo)*, tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Sosiologi, Program Pasca Sarjana UGM, 2000.
- Robertson, Roland, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Shills, David L. (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, New York: The MacMillan Company and The Free Press, 1972.
- Singarimbun, Masri, "Hak Ulayat Masyarakat Daerah." Makalah disampaikan pada Seminar Kebudayaan Dayak, Pontianak, 1992.
- _____ & Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Steenbrink, Karel, *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sudagung, Hendro Suroyo, "Pembinaan bangsa dan Karakter Bangsa Melalui Hubungan Antar Suku Bangsa" dalam *Proyeksi*, Universitas Tanjung Pura, 1987.
- Sumarjan, Selo, *Steriotif Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Svalastoga, Kaare, *Diferensiasi Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Tanja, Victor I., *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Thayib, Anshari, dkk. (ed.), *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.
- Wirosardjono, Soetjipto, *Agama dan Pluralitas bangsa*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.

Majalah dan Koran:

ADIL, 19 Maret 2001, 29 Maret 2001.

REPUBLIKA, 23 Februari 2001.

TEMPO, 23 Januari 2000.